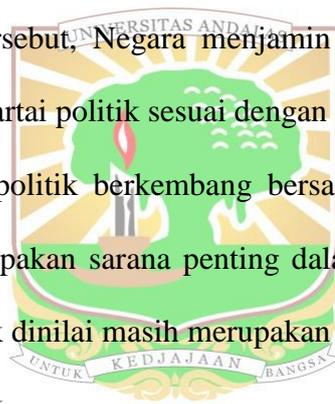


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan pemilu legilsatif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara¹ dan merupakan satu-satunya media yang dapat mengantar warga Negara menjadi kontestan pemilihan umum legislatif. Melalui landasan hukum tersebut, Negara menjamin seluruh warga Negara untuk berkumpul dan mendirikan partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses demokrasi yang merupakan sarana penting dalam pemilihan umum. Hingga saat ini, institusi partai politik dinilai masih merupakan alat politik yang paling ampuh untuk mencapai tujuan politik.



Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sehubungan dengan keberadaan partai politik, rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga

¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 397

yang resmi.² Partai politik telah hadir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.

Batasan mengenai partai politik dikemukakan oleh Sigmund Neumann yang berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing memperoleh dukungan rakyat.³ Dalam hal ini, pemilu merupakan ajang pembuktian kekuatan politik partai, dimana partai politik berjuang untuk memperebutkan suara untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik. Ketika partai politik tidak mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, dengan sendirinya partai politik tersebut akan tersisih dari sistem politik. Tentunya, dengan berkembangnya iklim demokrasi di suatu negara, rakyat sebagai pemilih menjadi penentu kemenangan partai politik dalam pemilu. Melalui pemilu, rakyat menyeleksi dengan memilih calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan politik dengan pilihannya pada kandidat-kandidat pada partai politik.

Salah satu hal yang cukup penting dalam persaingan politik di pemilu terletak pada bentuk sistem kepartaian yang dianut di suatu negara. Di Indonesia sendiri, bentuk sistem kepartaian yang dianut sejak dahulunya adalah sistem multi partai, khususnya semenjak bergulirnya reformasi. Dalam hal ini, menurut Adman Nursal, sistem multipartai yang dianut di Indonesia memungkinkan siapa saja boleh

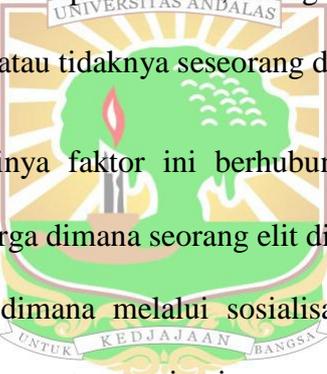
² Neumann, Sigmund, sebagaimana dikutip dalam buku Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 404

³ *Ibid.*, 404

mendirikan partai politik dan pada akhirnya akan melahirkan kompetisi antar partai sebagai sebuah konsekuensi.⁴ Kondisi tersebut tentu saja menumbuhkan persaingan politik yang kompetitif disebabkan banyaknya partai yang bertarung memperebutkan kekuasaan dalam pemilu.

Dalam pertarungan politik pasti melahirkan pemenang dan yang kalah. Meskipun seorang kandidat telah berusaha dengan segala sumber daya yang ia miliki tetapi hal tersebut belum menjamin ia akan memenangkan pemilu. Dalam praktek pemilu sejak dimulainya era reformasi, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terpilih atau tidaknya seorang kandidat.

Czudnowski, seperti dikutip Koirudin, mengemukakan beberapa hal yang dapat menentukan terpilihnya atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif:⁵

- 
- a) *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang elit dibesarkan.
 - b) *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
 - c) *Initial Political Activity*, dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
 - d) *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.

⁴ Nursal, Adman, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, dan Presiden*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004, hlm. 9

⁵ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm.101-102

- e) *Occupational Variable*, dimana disini calon elit dilihat pengalamannya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik.
- f) *Motivation*, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Poin diatas menunjukkan bahwa sosok kandidat yang diusung oleh partai politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kemenangan pemilu. Faktor personal kandidat sangat berkaitan dengan potensi ataupun modal basis massa yang ia miliki, kekuatan finansial dan kemampuan mengaktualisasi diri terhadap permasalahan yang paling hangat di tengah masyarakat sehingga ia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat elektabilitasnya hingga hari pemilihan.



Pada pemilu legislatif 2014, perolehan suara Partai Demokrat memperlihatkan tren yang negatif. Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah suara yang sangat signifikan dan hanya berhasil menempati peringkat keempat nasional perolehan suara terbanyak.⁶ Menurut Gede Pasek, hampir sebagian besar perolehan suara partai Demokrat di berbagai daerah menurun drastis jika dibandingkan dengan perolehan pada Pemilu 2009 lalu.⁷ Menurunnya perolehan kursi dan suara partai Demokrat ini juga terlihat di DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Berikut perbandingan perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 di tingkat Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat.

⁶ www.kpu.go.id hasil pemilu legislatif nasional 2014

⁷ Gede Pasek, dalam berita online <http://www.nusaonline.com/08/perolehan-suara-menurun-pasek-sindir-pengurus-harian-partai-demokrat.html> diakses tanggal 25 Maret 2015, pukul 20.45 WIB.

Tabel 1.1

**Perbandingan Perolehan Kursi Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Tahun
2009 dan 2014 di Tingkat Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat**

Nama Kabupaten/ Kota	2009	2014	Perbedaan	%
Kabupaten Agam	11 kursi	9 kursi	-2 kursi	-18%
Kabupaten Padang Pariaman	6 kursi	4 kursi	-2 kursi	-33%
Kabupaten Dharmasraya	3 kursi	2 kursi	-1 kursi	-66%
Kabupaten Mentawai	3 kursi	2 kursi	-1 kursi	-66%
Kabupaten Lima Puluh Kota	7 kursi	5 kursi	-2 kursi	28%
Kabupaten Pasaman Barat	5 kursi	5 kursi	Sama	0%
Kabupaten Pasaman	3 kursi	4 kursi	+1 kursi	+33%
Kabupaten Solok Selatan	3 kursi	3 kursi	Sama	0%
Kabupaten Tanah Datar	6 kursi	3 kursi	-3 kursi	-50%
Kabupaten Pesisir Selatan	7 kursi	5 kursi	-2 kursi	28%
Kabupaten Sijunjung	3 kursi	4 kursi	+1 kursi	+33%
Kabupaten Solok	6 kursi	3 kursi	-3 kursi	-50%
Kota Padang Panjang	3 kursi	2 kursi	-1 kursi	-33%
Kota Padang	17 kursi	5 kursi	-12 kursi	-72%
Kota Bukittinggi	8 kursi	4 kursi	-4 kursi	-50%
Kota Payakumbuh	5 kursi	3 kursi	-2 kursi	-40%
Kota Sawahlunto	2 kursi	3 kursi	+1 kursi	+50%
Kota Solok	6 kursi	3 kursi	-3 kursi	-50%
Kota Pariaman	2 kursi	0 kursi	-2 kursi	-100%

Sumber: KPU Propinsi Sumatera Barat

Hampir sebagian besar perolehan kursi partai Demokrat di kabupaten/ kota di Sumatera Barat pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pemilu 2009. Kenaikan perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten/ Kota hanya terjadi di tiga kabupaten/ kota saja, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Perolehan suara partai Demokrat di DPRD Kota Padang mengalami presentase penurunan yang paling besar dibandingkan daerah lainnya yaitu dari 17 kursi pada pemilu 2009 menjadi 5 kursi pada pemilu 2014. Walaupun di Kota Padang perolehan kursi partai Demokrat mengalami penurunan yang paling banyak, Partai Demokrat masih memperoleh kursi di DPRD. Begitu juga dengan daerah lainnya yang dimana partai Demokrat masih memperoleh kursi. Namun Kota Pariaman merupakan

satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak memperoleh satu kursi pun di DPRD pada Pemilu 2014.

Tabel 1.2
Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014 di DPRD Kota Pariaman

Partai Politik (2009)	Jumlah Kursi	Partai Politik (2014)	Jumlah Kursi
Partai Amanat Nasional	3 kursi	Partai Golongan Karya	3 kursi
Partai Golongan Karya	3 kursi	Partai Gerindra	3 kursi
Partai Demokrat	2 kursi	Partai Nasional Demokrat	3 kursi
PPP	2 kursi	Partai Bulan Bintang	3 kursi
Partai Keadilan Sejahtera	2 kursi	Partai Amanat Nasional	2 kursi
Partai Hanura	2 kursi	PPP	2 kursi
Partai Barisan Nasional	1 kursi	Partai Hanura	2 kursi
PKBIB	1 kursi	Partai Keadilan Sejahtera	1 kursi
PDIP	1 kursi	PDIP	1 kursi
Partai Bintang Reformasi	1 kursi		
Partai Nasional Republik	1 kursi		
Partai Syarikat Islam	1 kursi		
Total	20 kursi		20 kursi

Sumber: KPU Kota Pariaman

Transisi pemegang kursi DPRD Kota Pariaman sangat sengit. Dimana enam partai pemegang kursi parlemen kota Pariaman tahun 2009-2014 tidak dapat melanjutkan kekuasaannya pada periode 2014-2019. Bagian paling menariknya adalah salah satu partai yang “terusir” tersebut adalah Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang ketiga pada pemilu legislatif 2009-2014 dan menguasai dua kursi, salah satunya kursi wakil ketua DPRD Kota Pariaman atas nama Hasbillah selaku ketua DPC Partai Demokrat Kota Pariaman. Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pariaman, Hasbillah telah berhasil meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat yang sebelumnya pada pemilu legislatif 2004 hanya berhasil menguasai satu kursi. Namun pada pemilu 2014, Partai Demokrat Kota Pariaman yang juga dipimpin Hasbillah, mengalami kekalahan yang sangat telak. Dimana tidak ada satu pun caleg Partai Demokrat yang berhasil meraih kursi di DPRD Kota Pariaman.

Banyak faktor yang mempengaruhi kalahnya seorang dalam pemilu legislatif, salah satunya adalah kurang diminatinya sosok tersebut oleh masyarakat, diluar praktek *black campagne*. Faktor tersebut sepertinya berperan terhadap kalahnya Partai Demokrat Kota Pariaman pada pemilu legislatif 2014. Seperti yang dinyatakan oleh warga Kota Pariaman, Yesi Yulia, Kepala Urusan Pemerintahan Kantor Desa Pauh Barat:

“Kalau dilihat dari latar belakang calon-calon legislatif dari partai Demokrat kemaren, hanya pak Hasbillah rasanya yang memiliki kelebihan untuk dipilih. Dan selama masa kampanye banyak caleg Demokrat yang jarang menampilkan kampanyenya, seperti pembagian stiker atau yang lainnya.”⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ityaltha, kepala desa Pauh Timur:

“Komposisi caleg Demokrat kemaren memang sepertinya tidak seimbang. Maksudnya seperti ini, memang ada beberapa nama yang cukup elektabel, namun kebanyakan adalah nama-nama yang kurang memiliki kapasitas. Ibaratnya hanya untuk memenuhi kuota saja .”⁹

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan oleh partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik tersebut adalah rekrutmen partai politik.¹⁰ Proses Rekrutmen Politik yang baik sangat dibutuhkan bagi kelangsungan sebuah partai politik. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik ini semakin besar porsinya ketika partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau ketika partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan

⁸ Wawancara dengan Yesi Yulia, Kepala urusan pemerintahan kantor Desa Pauh Barat pada tanggal 18 Oktober 2016

⁹ Wawancara dengan Kepala Bagian Kesbangpol DPC Partai Demokrat Kota Pariaman pada tanggal 18 Oktober 2016

¹⁰ Amal, Ichlasul, *Edisi Teori-Teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Wacana Yogyakarta, 1996, hal. 28

perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya maka kelangsungan sistem politik itu sendiri akan terancam.¹¹

Dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu "product" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "product" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepaik terjang kader-kadernya.



Berikut nama-nama calon legislatif Partai Demokrat Kota Pariaman 2014:

Tabel 1.3

Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Kota Pariaman Periode 2014-2019

Pariaman I	Pariaman II	Pariaman III
Adri Suryadi	Nofrizal	Hasbillah, S.E
Syamsuniar	Zulhardi	Rahmat Kurnia
Ikhlas Darma Murya	Zurni Putri Mulyani	Warnita
Martini	Muhammad Barkia S.Ag	Toni Yuvitali
	Azhar	Neka Negra
	Sri Rahma Daniati	Lili Salfina
	Dedi Afrizal	Defrizal
	Rita Purnama Sari	

Sumber: KPU Kota Pariaman

¹¹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 150

Daerah pemilihan anggota Legislatif DPRD Kota Pariaman dibagi menjadi 3 daerah pemilihan. Daerah pemilihan I mencakup Kecamatan Pariaman Utara, sedangkan daerah pemilihan II mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Selatan dan Pariaman Timur dan daerah pemilihan III mencakup Kecamatan Pariaman Tengah. Kuota caleg daerah pemilihan Pariaman II lebih banyak dari daerah pemilihan yang lain dikarenakan daerah pemilihan ini mencakup 2 kecamatan. Diantara 4 kecamatan tersebut, Kecamatan Pariaman Selatan dan Timur memiliki luas wilayah yang relatif lebih kecil dibanding kecamatan Pariaman Utara dan Pariaman Tengah.

Tabel 1.4
Hasil Pemilihan Legislatif Partai Demokrat Kota Pariaman 2014

Dapil	Nama Caleg	Suara	Kader/ Eksternal
Dapil I	Ardi Suryadi S.H	293	Kader
Dapil I	Syamsuniar	351	Kader
Dapil I	Ikhlas Darma Putra	60	Eksternal
Dapil I	Martini	15	Eksternal
	Jumlah	719	
Dapil II	Nofrizal S.Pd	606	Kader
Dapil II	Zulharli	36	Kader
Dapil II	Zurni Putri Mulyani	20	Eksternal
Dapil II	M. Barkia S.Ag	220	Kader
Dapil II	Azhar	56	Eksternal
Dapil II	Sri Rahma Daniati	2	Eksternal
Dapil II	Dedi Afrizal	10	Kader
Dapil II	Rita Purnama Sari	6	Eksternal
	Jumlah	956	
Dapil III	Hasbillah S.E	592	Kader
Dapil III	Rahmat Kurnia	22	Kader
Dapil III	Warnita	16	Eksternal
Dapil III	Toni Yuvitali	64	Kader
Dapil III	Neka Negra	30	Kader
Dapil III	Lili Salfina	6	Eksternal
Dapil III	Defrizal	3	Kader
	Jumlah	733	

Sumber: KPUD Kota Pariaman dan DPC Partai Demokrat Kota Pariaman

Partai Demokrat Kota Pariaman tidak mampu mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada masing-masing dapil. Pada daerah pemilihan I, jumlah suara sah mencapai 10.915 suara dengan kuota 5 kursi dan BPP sebanyak 2.183 suara. Sedangkan daerah pemilihan II, jumlah suara sah sebanyak 17.667 suara dengan kuota 8 kursi dan BPP sebanyak 2.208 suara. Lalu pada daerah pemilihan III, jumlah suara sah sebanyak 16.762 suara dengan kuota 7 kursi dan BPP 2.395 suara. Dari 19 caleg Partai Demokrat, hanya 5 caleg yang mampu meraup dukungan diatas 100 suara, sedangkan 11 caleg tidak mampu meraup dukungan diatas 50 suara. Pemilu legislatif Kota Pariaman 2014 menunjukkan rendahnya tingkat elektabilitas caleg-caleg Partai Demokrat.

Dalam wawancara awal yang peneliti lakukan dengan wakil ketua Partai Demokrat Kota Pariaman, Rahmat Kurnia, menyebutkan bahwa Partai Demokrat Kota Pariaman telah menjalankan amanat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Demokrat Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang mekanisme penjurangan Caleg yaitu terdiri dari kader 80 % dan sisanya di rekrut dari tokoh/ninik mamak dari eksternal Demokrat, itupun tetap melalui seleksi dan penilaian seperti ketokohnya, keterwakilan tokoh. Jika kriteria terpenuhi akan diminta pernyataan tanggung jawabnya terhadap kesiapan diri sesuai aturan yang telah ditetapkan partai jika terpilih.¹²

Seperti yang dikatakan oleh Rully Chairul Azwar.M.Si, semakin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "*product*" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Dan semakin baik "*product*" yang

¹² Hasil wawancara dengan Rahmat Kurnia, wakil ketua DPC Partai Demokrat Kota Pariaman dan caleg dapil II pada tanggal 13 Agustus 2016

dihasilkan oleh partai, semakin baik pula kinerja dan kelangsungan hidup partai tersebut.

Pada pileg Kota Pariaman 2014, Partai Demokrat banyak diisi oleh kalangan eksternal partai. Hasil pileg sendiri menunjukkan bahwa caleg-caleg yang direkrut dari eksternal partai tidak mampu menarik suara yang signifikan bagi partai untuk melewati Bilangan Pembagi Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman per daerah pemilihan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.¹³ Penempatan calon-calon tersebut dimulai dari adanya proses rekrutmen oleh partai baik dari kader maupun kalangan umum atau simpatisan (eksternal).

Kekalahan Partai Demokrat pada pileg Kota Pariaman 2014 menarik untuk diteliti karena pada pileg sebelumnya, periode 2009-2014, Partai Demokrat berhasil memenangkan dua kursi parlemen dan mengantarkan Hasbillah selaku ketua partai menjadi wakil ketua DPRD Kota Pariaman 2009-2014. Namun pada periode 2014-2019 Partai Demokrat Kota Pariaman gagal meraih satupun kursi parlemen. Bahkan dari tiga dapil yang ada, suara yang diperoleh Partai Demokrat Kota Pariaman tidak mampu melewati satupun Bilangan Pembagi Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Pariaman. Meski menyatakan telah menjalankan amanat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Demokrat Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang mekanisme penjaringan Caleg, namun hampir semua bakal calon legislatif yang

¹³ Budiardjo, Miriam.2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. Hal:404-405

diloloskan oleh Partai Demokrat Kota Pariaman melalui jalur rekrutmen partai untuk maju menjadi caleg pada pileg 2014-2019 tidak mampu meraup suara yang signifikan bagi partai untuk melewati Bilangan Pembagi Pemilih.

Dari uraian tersebut, peneliti ingin membuktikan apakah Partai Demokrat Kota Pariaman telah menjalankan Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Politik Nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang mekanisme penjaringan caleg atau apakah terdapat masalah atau kendala dalam pelaksanaan rekrutmen politik tersebut. Maka dari itu, rumusan masalah yang ingin peneliti teliti adalah bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Demokrat Kota Pariaman dalam menetapkan caleg sehingga terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisa pola rekrutmen Partai Demokrat Kota Pariaman dalam menetapkan calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pariaman.



D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat mendeskripsikan dan menganalisa pola rekrutmen Partai Demokrat Kota Pariaman dalam menetapkan calon anggota Legislatif pada pemilu Legislatif 2014 di Kota Pariaman
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai analisa pola rekrutmen partai dalam menetapkan calon anggota Legislatif dalam menghadapi Pemilu legislatif mendatang.